



KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM

# Laporan Kinerja

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal  
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Tahun Anggaran 2024



## KATA PENGANTAR

Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal merupakan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan peran strategis untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terhadap sasaran pembangunan nasional tersebut dilaksanakan melalui program "Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal" dengan sasaran "meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal"

Laporan Kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan informasi terkait realisasi capaian Indikator Kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pembelajaran dalam mendukung proses evaluasi kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal secara keseluruhan terutama dalam menghadapi tantangan yang akan datang serta dapat meningkatkan optimalisasi kinerja ke depan agar dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun terhadap evaluasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2025  
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal



Dedi Latip



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>I</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>II</b>  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>   | <b>III</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| A. LATAR BELAKANG.....   | 1          |
| B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL.....                                 | 2          |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN.....  | 7          |
| D. ASPEK STRATEGIS UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL .....  | 8          |
| E. ISU STRATEGIS UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL .....  | 8          |
| F. SISTEMATIKA LAPORAN.....  | 9          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>  | <b>11</b>  |
| A. RENCANA STRATEGIS.....  | 11         |
| B. PERJANJIAN KINERJA .....  | 13         |
| C. PENGUKURAN KINERJA .....  | 16         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>   | <b>28</b>  |
| A. CAPAIAN KINERJA UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL .....  | 28         |
| B. CAPAIAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL .....                               | 30         |
| C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL .....                                | 30         |
| D. REALISASI ANGGARAN.....   | 59         |
| E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....   | 61         |
| <b>BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | <b>64</b>  |
| A. PENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL.....  | 64         |
| B. PERLUNYA KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT .....  | 65         |
| C. PENGEMBANGAN USER INTERFACE DI WEBSITE PIR UNTUK PETA PELUANG INVESTASI.....  | 65         |
| D. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAGI PEGAWAI DI UNIT KEDEPUTIAN BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL ..... | 65         |
| E. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL .....                                    | 65         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>67</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>69</b>  |



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi. Secara umum capaian kinerja Deputi Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mendapatkan kategori **SANGAT BAIK**, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) senilai 104,10.
2. Dari 10 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang nilainya mencapai atau melebihi 100% dengan kategori **SANGAT BAIK** dan 2 (dua) indikator kinerja yang nilainya di bawah 100% dengan kategori **BAIK** dan **CUKUP**.
3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp 25.805.472.000 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.241.971.460 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau mencapai 93,94% dari total pagu anggaran.

Secara keseluruhan capaian kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, dokumen Laporan Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 akan menjadi referensi bagi seluruh personil Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya inovasi untuk mendorong investasi, memberikan kemudahan berusaha, perbaikan kebijakan dan deregulasi, serta mempercepat transformasi ekonomi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik, memberikan ruang yang besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong penyerapan tenaga kerja.

Dalam perannya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan investasi berkualitas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana tercantum pada Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berperan dalam peningkatan realisasi penanaman modal dengan melaksanakan program perencanaan penanaman modal.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebagai media pertanggungjawaban tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan pelaporan atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun



2024. Selain itu, Laporan Kinerja juga untuk mengukur, menilai dan mengevaluasi capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, serta sebagai rekomendasi untuk program kerja di periode mendatang agar lebih efisien, efektif, tepat sasaran, dan responsif dalam melaksanakan perencanaan penanaman modal. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal diamanatkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya terdiri atas 4 (empat) direktorat sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.



**Gambar 1: Struktur Organisasi Deputi Perencanaan Penanaman Modal**

Adapun tugas dan fungsi pada masing-masing Direktorat adalah sebagai berikut:

### 1. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam

Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha sumber daya alam;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang sumber daya alam;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang sumber daya alam;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang sumber daya alam;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal rencana umum, rencana strategis, rencana

- pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri manufaktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang industri manufaktur;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang industri manufaktur;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha industri manufaktur;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang industri manufaktur;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang industri manufaktur;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang industri manufaktur;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang industri manufaktur; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



### 3. Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha industri jasa dan kawasan;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang jasa dan kawasan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang jasa dan kawasan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang jasa dan kawasan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### 4. Direktorat Perencanaan Infrastruktur

Direktorat Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta dan non-skema



kerja sama pemerintah dan swasta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha infrastruktur;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang infrastruktur;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang infrastruktur;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang infrastruktur;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Perencanaan Infrastruktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### C. MAKSLUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan dan pelaksanaan kinerja Deputi Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Deputi Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024.
2. Menjadi bahan acuan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan program kegiatan Deputi Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024.



#### D. ASPEK STRATEGIS UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu “*peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal*” serta “*peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*”. Dalam hal ini, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal memiliki peran penting dalam pelaksanaan strategi “*Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)*”, melalui:

1. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
2. Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
5. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
6. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (*investor needs*); dan
7. Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.

#### E. ISU STRATEGIS UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Isu strategis organisasi Satuan Kerja/Eselon I yang dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya:



1. Perlu sinergi yang berkesinambungan dengan unit terkait dalam menindaklanjuti hasil penyusunan kajian yang telah dilakukan di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal.
2. Terjadinya *refocusing* anggaran beberapa kali sepanjang tahun berjalan yang menyebabkan adanya perubahan strategi pencapaian output.
3. Permasalahan terkait sumber daya manusia, yaitu terdapat kekosongan sumber daya manusia terutama pada jabatan tertentu.
4. Keterbatasan data dan informasi pendukung sehingga penyiapan pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan menjadi kurang optimal. Selain itu, beberapa *stakeholder* terkait dinilai masih kurang responsif ketika dilakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan tersebut, isi Laporan Kinerja digariskan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, beserta penjelasan dan analisis hasil kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, serta menyajikan perbandingan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

## BAB IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijabarkan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2024 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja.

## Bab V Penutup

Menyimpulkan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024, memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian program dan kegiatan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 yang dituangkan juga dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP/03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L Tahun 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi pimpinan K/L dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu: "*BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.*"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan), yaitu: **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.** Tujuan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 1: Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM 2020-2024**

| Dukungan BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden  | Dukungan BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden   | Tujuan  | Sasaran Strategis  |
|--|---|---|--|
| BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” | <p>Struktur Ekonomi yang Produktif, mandiri, dan Berdaya Saing</p> <p>Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p> | <p>Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal</p> <p>Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya realisasi penanaman modal</li> <li>2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal</li> <li>3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani</li> </ol> |

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, telah ditetapkan Sasaran Program “**Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal**” yang akan dicapai melalui pelaksanaan program di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Keberhasilan pencapaian Sasaran Program tersebut akan dinilai melalui pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Program: “**Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal**”.

Keterkaitan antara Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dengan Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat dilihat pada Gambar berikut.

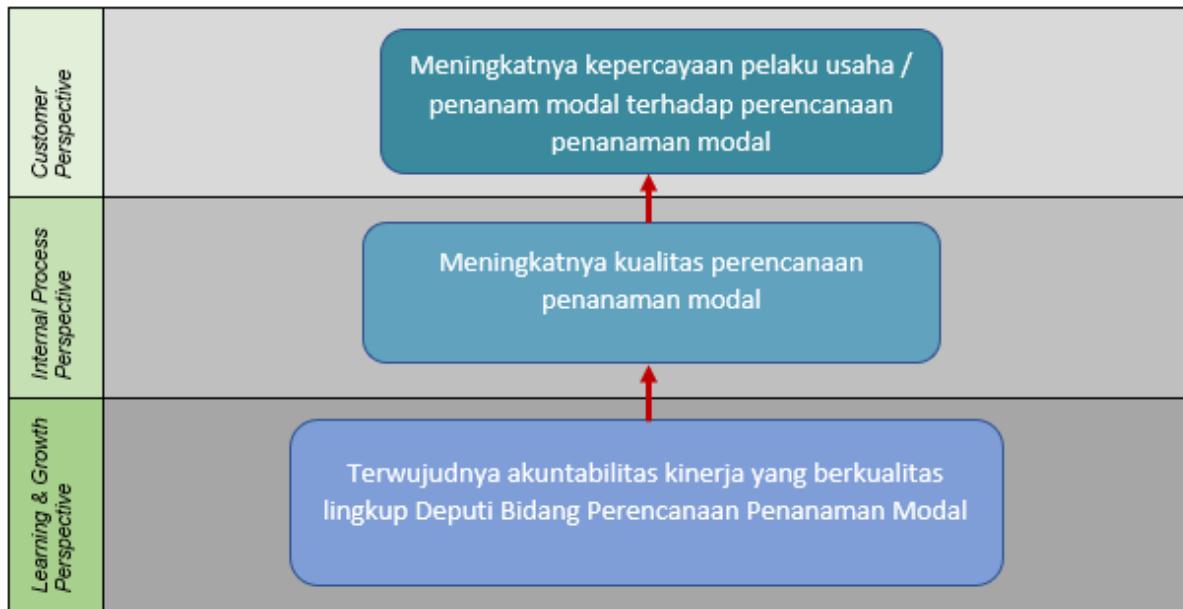


**Gambar 2: Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja/komitmen antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal disusun dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi dalam suatu peta strategi. Peta strategi menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab-akibat dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif yang ada dalam metode BSC yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) perspektif dalam metode BSC yang menggambarkan dukungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terhadap Sasaran Strategis Kepala BKPM selaku pemangku kepentingan yang dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 3: Peta Strategi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

- Customers Perspective*, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customers dan/atau harapan organisasi terhadap customers. Customers (pengguna layanan) merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap

perencanaan penanaman modal” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) atas perencanaan penanaman modal”.

- b. *Internal Process Perspective*, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholders dan *customers* (*value chain*). Perspektif ini mencakup Sasaran Program ke-1 (SP-1) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal”, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sebagai berikut:
- 1) Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  - 2) Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti;
  - 3) Persentase *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang ditindaklanjuti;
  - 4) Persentase Peta Peluang Investasi (PPI) yang ditindaklanjuti; serta
  - 5) Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi.
- c. *Learning and Growth Perspective*, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customers* dan stakeholder. Perspektif ini mencakup 1 (satu) Sasaran Program, yaitu “Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal” memiliki 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
  - 2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
  - 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; dan
  - 4) Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 memuat Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target yang terkait dengan tugas fungsi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Perjanjian Kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024**

| SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA                      |  | TARGET |
|---|--|--|--------|
| <b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>   |  |  |        |
| 1. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal           | 1.                                     | Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) perencanaan penanaman modal (indeks)                                      | 4,3    |
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>   |  |  |        |
| 2. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal  | 2.                                     | Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)   | 4,3    |
|   | 3.                                     | Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)   | 61     |
|   | 4.                                     | Persentase <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) yang ditindaklanjuti (%)  | 61     |
|   | 5.                                     | Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti (%)   | 61     |
|   | 6.                                     | Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi (%)   | 100    |
|   | <b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b> |  |        |
| 3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 7.                                     | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (predikat / nilai) | 80     |
|   | 8.                                     | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (skala)   | 4      |
|   | 9                                      | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)                        | 86     |
|   | 10.                                    | Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)                        | 5      |

## C. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan



kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan membandingkan antara target dan realisasi maka diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NKO} = \Sigma (\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Bobot Perspektif})$$

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Bobot pada masing-masing perspektif ditentukan seperti pada Tabel berikut:

**Tabel 3: Bobot Perspektif**

| NO | PERSPEKTIF                 | BOBOT |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | <i>Customer</i>            | 40%   |
| 2  | <i>Internal Process</i>    | 30%   |
| 3  | <i>Learning and Growth</i> | 30%   |

Selanjutnya, tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori seperti pada Tabel berikut.

**Tabel 4: Kategori Pengukuran**

| NO | NILAI         | KODE       | KATEGORI    |
|----|---------------|------------|-------------|
| 1  | 100 – ke atas | Hijau      | Sangat Baik |
| 2  | 76 – 99       | Hijau Muda | Baik        |
| 3  | 61 – 75       | Kuning     | Cukup       |
| 4  | 51 – 60       | Oranye     | Kurang      |
| 5  | 50 – ke bawah | Merah      | Buruk       |

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran 10 Indikator Kinerja di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, sebagai berikut:



## 1. Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal

Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal merupakan nilai yang diperoleh dari hasil survei kepuasan *stakeholder* terkait atas pelaksanaan kegiatan perencanaan penanaman modal di unit kerja Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dihitung dengan menggunakan survei kinerja pelaksanaan perencanaan penanaman modal tahun sebelumnya.

Perhitungannya menggunakan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (pelaku usaha/penanam modal terkait) atas pelaksanaan kegiatan perencanaan penanaman modal yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dengan satuan indeks. Data yang digunakan dalam pengkuran IKU ini adalah dokumen hasil survei. Adapun formula perhitungan yang dimaksud yaitu:

$$NKC = \frac{1}{n} \sum NKC_i$$

dengan:

NKC : Rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas pelaksanaan kegiatan perencanaan penanaman modal

NKC<sub>i</sub> : Total Nilai kepuasan sejumlah responden atas pelaksanaan kegiatan Perencanaan penanaman modal

n : Jumlah Responden

Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal diukur dalam skala *linear* kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik).

Pada tahun 2024, target Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 4,3 dari skala 5.



## 2. Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal

Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal merupakan nilai yang diperoleh dari hasil survei kepuasan stakeholder terkait atas pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi dan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal di Unit Kerja Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

IKU ini dihitung dengan menggunakan Survei kualitas dokumen pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal dan kinerja koordinasinya (Renstra, Kajian, IPRO, PPI) tahun sebelumnya. Perhitungannya menggunakan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (pelaku usaha/penanam modal terkait) atas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, termasuk pemetaan potensi atau peluang penanaman modal berbasis sektor, yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang dengan satuan indeks. Data yang digunakan dalam pengukuran IKU ini adalah dokumen hasil survei. Adapun formula perhitungan yang dimaksud yaitu:

$$NPP = \frac{1}{n} \sum NPP_i$$

dengan:

NPP : Rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (*stakeholder* terkait) atas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, termasuk pemetaan potensi atau peluang penanaman modal berbasis sektor, yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

NPP<sub>i</sub> : Jumlah hasil survei terhadap sejumlah responden (*stakeholder* terkait) atas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, termasuk pemetaan potensi atau peluang penanaman modal berbasis sektor, yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

n : Jumlah Responden

Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal diukur dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pada tahun 2024, target Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 4,3 dari skala 5.



### 3. Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti

Rekomendasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut dari hasil penyusunan kajian peta potensi pengembangan sektoral. Rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal disusun dalam rangka mensinergikan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal sektoral untuk mendorong pengembangan penanaman modal pada sektor yang dikaji. Tindak lanjut penyusunan rekomendasi perencanaan pengembangan penanaman modal berupa usulan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal sektoral kepada stakeholder terkait.

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$NRK = \frac{\sum TLRK_{n-1}}{\sum RK_{n-1}} \times 40\% + (NDRK_{n-1} \times 30\%) + \left( \frac{\sum RK_{n-1}}{\sum TRK_n} \times 30\% \right)$$

dengan:

- NRK : Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti
- TLRK : Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait NDRK Nota dinas/Surat penyampaian rekomendasi kebijakan tahun berjalan kepada *stakeholder* terkait
- RK : Jumlah rekomendasi kebijakan pada Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal
- TRK : Jumlah rekomendasi kebijakan pada Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal
- n-1 : Tahun sebelumnya
- n : Tahun berjalan

Data yang digunakan untuk mengukur IKU ini berasal dari Dokumen kajian serta rekomendasi kebijakan di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada tahun berjalan, nota dinas/surat penyampaian *summary* kajian dan rekomendasi kebijakan di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal



kepada *stakeholder* terkait, serta laporan rapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Pada tahun 2024, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 61%.

#### 4. Persentase *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang ditindaklanjuti

*Investment Project Ready to Offer* (IPRO) merupakan profil proyek yang siap untuk ditawarkan kepada investor. *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) memuat tentang studi kelayakan suatu proyek yang mencakup pemetaan terhadap potensi pengembangan, dukungan bahan baku, peluang pasar, lokasi potensial, prosedur dan regulasi terkait sektor, insentif yang dapat diberikan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kelayakan teknis dan finansial dengan tingkat analisis pra-studi kelayakan.

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$NIPRO = \frac{\sum TLIPRO_{n-1}}{\sum IPRO_{n-1}} \times 40\% + (NDIPRO_{n-1} \times 30\%) + \left( \frac{\sum IPRO_{n-1}}{\sum TIPRO_n} \times 30\% \right)$$

dengan:

|        |  |
|--------|--|
| NIPRO  | : Persentase <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti (jumlah laporan atas <i>event</i> promosi (webinar, <i>investment forum</i> yang dilaksanakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan/atau bekerja sama dengan pihak lain, beserta lingkup proyek yang ditawarkan dibandingkan dengan jumlah dokumen IPRO yang disampaikan) |
| TLIPRO | : IPRO Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti   |
| NDIPRO | : Nota dinas penyampaian IPRO ke Kedeputian Promosi  |
| n-1    | : Tahun sebelumnya   |
| n      | : Tahun berjalan   |

Data yang digunakan untuk mengukur IKU ini berasal dari Dokumen IPRO di Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal pada tahun berjalan, nota dinas penyampaian IPRO di Kedeputian perencanaan Penanaman Modal kepada Deputi Promosi, serta Laporan atas *event* promosi (webinar, *investment forum*)



dilaksanakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan/atau bekerjasama dengan pihak lain, beserta lingkup proyek yang ditawarkan. Pada tahun 2024, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 61%.

## 5. Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti

Penyusunan peta peluang investasi proyek dilakukan pada *major project* dan/atau proyek strategis nasional yang didorong Pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 dan/atau ketentuan perundangan terkait. Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan dilakukan hingga tahap pra studi kelayakan proyek, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendetail terkait kelayakan suatu proyek baik dari aspek legal, teknis, keekonomian, dan finansial kepada investor.

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$NPPI = \frac{\sum TLPPI_{n-1}}{\sum PPI_{n-1}} \times 40\% + \left( \frac{\sum PPI_{n-1}}{\sum TPPI_n} \times 30\% \right) + (NDPPI_n \times 30\%)$$

dengan:

|       |  |
|-------|--|
| NPPI  | : Presentasi PPI yang ditindaklanjuti Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal  |
| TLPPI | : Jumlah PPI di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan/atau bekerjasama dengan pihak lain |
| TPPI  | : Target PPI Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman   |
| PPI   | : Jumlah dokumen PPI pada Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal  |
| NDPPI | : Nota Dinas Penyampaian PPI pada Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal  |
| n-1   | : Tahun sebelumnya   |
| n     | : Tahun berjalan   |

Data yang digunakan untuk mengukur IKU ini berasal dari Nota Dinas penyampaian Proyek PPI ke Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Laporan atas *event* promosi (webinar, *investment forum*, diseminasi), dilaksanakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan/atau bekerja sama dengan pihak lain, beserta lingkup proyek yang ditawarkan serta dokumen PPI tahun berjalan. Pada tahun 2024, target Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 61%.



## 6. Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi

Fasilitasi rencana proyek penanaman modal dilakukan dalam rangka pemberian informasi terkait kebijakan dan rencana pengembangan sektor serta penyelesaian masalah kepada calon investor potensial sebelum mengajukan perizinan berusaha. Selain pemberian informasi dan penyelesaian masalah, pelaksanaan fasilitasi rencana proyek penanaman modal juga bertujuan untuk mengidentifikasi masukan dari calon investor terkait potensi pengembangan sektor-sektor baru serta kebijakan yang menghambat di bidang penanaman modal.

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$FS = \frac{\Sigma BPF}{\Sigma TBPF} \times 100\%$$

dengan:

- FS : Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi  
BPF : Jumlah badan usaha/proyek yang difasilitasi  
TBPF : Jumlah target yang harus difasilitasi pada tahun berjalan

Data yang digunakan untuk mengukur IKU ini berasal dari laporan fasilitasi. Pada tahun 2024, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 100%.

## 7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawab yang jelas dan teratur dan efektif disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah berupa nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian APIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Nilai ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi AKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%, evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Capaian nilai evaluasi AKIP Deputi Bidang Perencanaan Penanaman modal berdasarkan hasil penilaian APIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kategori nilai evaluasi AKIP yaitu:

**Tabel 5: Kategori Penilaian Laporan Kinerja**

| Kategori | Nilai   | Predikat         |
|----------|---------|------------------|
| AA       | >90-100 | Sangat Memuaskan |
| A        | >80-90  | Memuaskan        |
| BB       | >70-80  | Sangat Baik      |
| B        | >60-70  | Baik             |
| CC       | >50-60  | Cukup            |
| C        | >30-50  | Kurang           |
| D        | 0-30    | Sangat Kurang    |

Pada tahun 2024, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah 80.

#### 8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ke dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

(<http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/>).

Pengukuran IKU ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

$$NK = (P \times WP) + (K \times WK) + (PK \times WPK) + (E \times WE)$$



dengan:

- NK : Nilai Kinerja atas aspek implementasi
- P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot penyerapan anggaran (WP) = 9,7%)
- K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK)=18,2%)
- PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian keluaran (WPK)=43,5%)
- E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot efisiensi (WE)=28,6%)

Pada tahun 2024, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 4 dari skala 4.

## 9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Dltjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring* (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 Indikator kinerja yang dinilai dalam perhitungan IKPA antara lain:



- Revisi DIPA (Bobot 10%)
- Deviasi Halaman III DIPA (Bobot 10%)
- Data Kontrak (Bobot 10%)
- Penyelesaian Tagihan (Bobot 10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (Bobot 10%)
- Dispensasi SPM (Bobot 5%)
- Penyerapan Anggaran (Bobot 20%)
- Capaian Output (Bobot 25%)

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot}$$

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $\leq 70$ .

Pada tahun 2024, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah 86.

**10. Batas Tertinggi Persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal TA 2013**

Nilai temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$A = \sum_{i=0}^n \frac{B}{C} \times 100\%$$

dengan:

- A : Persentase Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal  
B : Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran sebelumnya

- C : Realisasi anggaran tahun sebelumnya
- n : Banyaknya temuan
- i : Batas bawah

Pada tahun 2024, batas tertinggi nilai temuan atas laporan keuangan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal tidak melebihi 5%.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Capaian kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal didasarkan atas Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024. Mekanisme penghitungan capaian kinerja menggunakan formula perhitungan/pengukuran yang terdapat pada Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Manual IKU) Tahun 2024. Berdasarkan pendekatan tersebut, capaian kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6: Capaian Kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024**

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             | REALISASI | %      | KATEGORI    | RATA-RATA | SKOR  |
|--|--|--------------------|-----------|--------|-------------|-----------|-------|
| <b>CUSTOMER PERSPECTIVE (40%)</b>  |  |                    |           |        |             |           |       |
| 1 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal terhadap perencanaan penanaman modal | 1 Indeks kepuasan pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) perencanaan penanaman modal (indeks) | 4,3 dari skala 5,0 | 4,42      | 102,79 | Sangat Baik | 102,79    | 41,12 |
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)</b>  |  |                    |           |        |             |           |       |
| 2 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal  | 2 Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)                   | 4,3 dari skala 5,0 | 4,43      | 103,02 | Sangat Baik | 113,05    | 33,92 |
|  | 3 Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)             | 61                 | 68,88     | 112,92 | Sangat Baik |           |       |
|  | 4 Persentase <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) yang dipromosikan (%)                 | 61                 | 66,67     | 109,30 | Sangat Baik |           |       |
|  | 5 Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti (%)                                 | 61                 | 95,56     | 120,00 | Sangat Baik |           |       |

| SASARAN KEGIATAN                               |  | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET | REALISASI | %      | KATEGORI           | RATA-RATA | SKOR          |
|--|--|-------------------|--|--------|-----------|--------|--------------------|-----------|---------------|
|  |  | 6                 | Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi (%)   | 100    | 166,67    | 120,00 | Sangat Baik        |           |               |
| <b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (30%)</b> |  |                   |  |        |           |        |                    |           |               |
| 3  | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 7                 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (predikat / nilai) | 80     | 79,8      | 99,75  | Sangat Baik        | 96,91     | 29,07         |
|  |  | 8                 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (skala)   | 4      | 3,0       | 75,00  | Cukup              |           |               |
|  |  | 9                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)                        | 86     | 79,89     | 92,90  | Baik               |           |               |
|  |  | 10                | Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)                        | 5      | 0,95      | 120    | Sangat Baik        |           |               |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>          |  |                   |  |        |           |        | <b>Sangat Baik</b> |           | <b>104,10</b> |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator kinerja di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mendapatkan kategori **SANGAT BAIK**, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) senilai 104,10. Secara detail, 6 indikator kinerja mencapai kategori SANGAT BAIK, 1 indikator kinerja berada pada kategori BAIK, dan 1 indikator kinerja memperoleh nilai CUKUP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal telah memenuhi, atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

## B. CAPAIAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Penilaian tingkat capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian pada masing-masing indikator kinerja tahun 2024. Berdasarkan pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024 adalah sebesar 104,10. Rincian perhitungan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 7: Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)  
Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024**

| PERSPEKTIF                 | BOBOT | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM  | JUMLAH IKU | NILAI SASARAN (%) | SKOR NILAI SASARAN (%) | NKO    |
|----------------------------|-------|--|------------|-------------------|------------------------|--------|
| <i>Customers</i>           | 40%   | Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal            | 1          | 102,79            | 41,12                  | 104,10 |
| <i>Internal Process</i>    | 30%   | Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal  | 5          | 113,05            | 33,92                  |        |
| <i>Learning and Growth</i> | 30%   | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 4          | 96,91             | 29,07                  |        |

## C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA UNIT DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dilakukan dengan melihat capaian masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun 2024. Selain itu, analisis juga dilakukan melalui perbandingan terhadap capaian indikator kinerja sejenis pada tahun-tahun sebelumnya. Penjelasan terkait capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## 1. Indikator Kinerja Pertama: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Perencanaan Penanaman modal

Capaian indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Perencanaan Penanaman Modal**” diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei kepada sejumlah responden (*stakeholder*), baik dari Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, perwakilan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta asosiasi, terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Perkembangan target dan capaian kinerja “**Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Perencanaan Penanaman Modal**” dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 8: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Perencanaan Penanaman Modal”**

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020          |         | TAHUN 2021           |         | TAHUN 2022             |         | TAHUN 2023            |         | TAHUN 2024          |         |
|---|---------------------|---------|----------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|---------|
|   | TARGET              | CAPAIAN | TARGET               | CAPAIAN | TARGET                 | CAPAIAN | TARGET                | CAPAIAN | TARGET              | CAPAIAN |
| Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> atas Perencanaan Penanaman Modal   | 3,5                 | 4,34    | 3,65                 | 4,33    | 3,75<br>dari skala 5,0 | 4,40    | 4,2<br>dari skala 5,0 | 4,41    | 4,3<br>dari skala 5 | 4,42    |
| Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam   |                     |         |                      |         |                        |         |                       |         |                     |         |
| Indeks kepuasan <i>Stakeholder</i> atas Perencanaan Penanaman Modal Bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya | 3,5<br>dari skala 5 | 4,15    | 3,65<br>dari skala 5 | 4,19    | -                      | -       | -                     | -       | -                   | -       |
| Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) Perencanaan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam             | -                   | -       | -                    | -       | 3,75<br>dari skala 5,0 | 4,47    | 4,2<br>dari skala 5,0 | 4,28    | 4,3<br>dari skala 5 | 4,3     |
| Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur  |                     |         |                      |         |                        |         |                       |         |                     |         |



| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020       |         | TAHUN 2021        |         | TAHUN 2022          |         | TAHUN 2023         |         | TAHUN 2024       |         |
|---|------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
|   | TARGET           | CAPAIAN | TARGET            | CAPAIAN | TARGET              | CAPAIAN | TARGET             | CAPAIAN | TARGET           | CAPAIAN |
| Indeks kepuasan Stakeholder atas Perencanaan Penanaman Modal Bidang Industri Manufaktur                     | 3,5 dari skala 5 | 4,17    | 3,65 dari skala 5 | 4,35    | -                   | -       | -                  | -       | -                | -       |
| Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Perencanaan Penanaman Modal Bidang Industri Manufaktur   | -                | -       | -                 | -       | 3,75 dari skala 5,0 | 4,24    | 4,2 dari skala 5,0 | 4,61    | 4,3 dari skala 5 | 4,6     |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>  |                  |         |                   |         |                     |         |                    |         |                  |         |
| Indeks kepuasan Stakeholder atas Perencanaan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan                        | 3,5 dari skala 5 | 4,53    | 3,65 dari skala 5 | 4,44    | -                   | -       | -                  | -       | -                | -       |
| Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) atas Perencanaan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan | -                | -       | -                 | -       | 3,75 dari skala 5,0 | 4,67    | 4,2 dari skala 5,0 | 4,4     | 4,3 dari skala 5 | 4,4     |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>   |                  |         |                   |         |                     |         |                    |         |                  |         |
| Indeks kepuasan Stakeholder atas Perencanaan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur                           | 3,5 dari skala 5 | 4,5     | 3,65 dari skala 5 | 4,33    | -                   | -       | -                  | -       | -                | -       |
| Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) atas Perencanaan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur    | -                | -       | -                 | -       | 3,75 dari skala 5,0 | 4,2     | 4,2 dari skala 5,0 | 4,3     | 4,3 dari skala 5 | 4,4     |

Capaian indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Perencanaan Penanaman Modal**” Tahun 2024 sebesar 4,42 dari skala 5,0 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,3 dari skala 5,0, atau mencapai 102,79% dari target dan masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**. Capaian indikator kinerja ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan indikator kinerja sejenis yaitu sebesar 4,33 dari skala 5,0 pada tahun 2021 dan 4,40 dari skala 5,0 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal semakin baik dan memuaskan bagi stakeholder terkait.

## 2. Indikator Kinerja Kedua: Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)

Capaian indikator kinerja “**Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal**” diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (*stakeholder*) atas pelaksanaan kegiatan Rencana Pengembangan Penanaman Modal. Perkembangan target dan capaian kinerja “**Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal**” dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 9: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja “Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)”**

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020          |                     | TAHUN 2021          |                     | TAHUN 2022          |                     | TAHUN 2023         |                     | TAHUN 2024          |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | TARGET              | CAPAIAN             | TARGET              | CAPAIAN             | TARGET              | CAPAIAN             | TARGET             | CAPAIAN             | TARGET              | CAPAIAN             |
| <b>Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal</b>                                       | 3,50 dari skala 5,0 | 4,25 dari skala 5,0 | 3,65 dari skala 5,0 | 4,23 dari skala 5,0 | 3,75 dari skala 5,0 | 4,44 dari skala 5,0 | 4,2 dari skala 5,0 | 4,35 dari skala 5,0 | 4,30 dari skala 5,0 | 4,43 dari skala 5,0 |
| <b>Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal bidang Industri dan Sumber Daya Alam Lainnya | 3,50 dari skala 5,0 | 4,20 dari skala 5,0 | 3,65 dari skala 5,0 | 4,10 dari skala 5,0 | -                   | -                   | -                  | -                   | -                   | -                   |
| Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal bidang Sumber Daya Alam                      | -                   | -                   | -                   | -                   | 3,75 dari skala 5,0 | 4,87 dari skala 5,0 | 4,2 dari skala 5,0 | 4,23 dari skala 5,0 | 4,2 dari skala 5,0  | 4,4 dari skala 5,0  |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</b>  | 3,50 dari skala 5,0 | 4,13 dari skala 5,0 | 3,65 dari           | 4,34 dari skala 5,0 |                     | 4,21 dari skala 5,0 | 4,2 dari skala 5,0 | 4,47 dari skala 5,0 | 4,4 dari skala 5,0  | 4,5 dari skala 5,0  |



| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020          |                     | TAHUN 2021          |                     | TAHUN 2022          |                     | TAHUN 2023         |                     | TAHUN 2024          |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | TARGET              | CAPAIAN             | TARGET              | CAPAIAN             | TARGET              | CAPAIAN             | TARGET             | CAPAIAN             | TARGET              | CAPAIAN             |
| <b>Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal</b>                     | 3,50 dari skala 5,0 | 4,25 dari skala 5,0 | 3,65 dari skala 5,0 | 4,23 dari skala 5,0 | 3,75 dari skala 5,0 | 4,44 dari skala 5,0 | 4,2 dari skala 5,0 | 4,35 dari skala 5,0 | 4,30 dari skala 5,0 | 4,43 dari skala 5,0 |
| Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal bidang Industri Manufaktur |                     |                     | skala 5,0           |                     | 3,75 dari skala 5,0 |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal bidang Jasa dan Kawasan    | 3,50 dari skala 5,0 | 4,42 dari skala 5,0 | 3,65 dari skala 5,0 | 4,25 dari skala 5,0 | 3,75 dari skala 5,0 | 4,67 dari skala 5,0 | 4,2 dari skala 5,0 | 4,4 dari skala 5,0  | 4,4 dari skala 5,0  | 4,4 dari skala 5,0  |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal bidang Infrastruktur       | 3,50 dari skala 5,0 | 4,24 dari skala 5,0 | 3,65 dari skala 5,0 | 4,23 dari skala 5,0 | 3,75 dari skala 5,0 | 4,00 dari skala 5,0 | 4,2 dari skala 5,0 | 4,30 dari skala 5,0 | 4,30 dari skala 5,0 | 4,42 dari skala 5,0 |

Capaian indikator kinerja “Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal” Tahun 2024 sebesar 4,43 dari skala 5,0 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,3 dari skala 5,0, atau mencapai 102,8% dari target dan masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**. Capaian indikator kinerja tahun 2024 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 4,35 dari skala 5,0. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 4,35 dari skala 5,0, capaian indikator kinerja tahun ini sedikit lebih

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman semakin baik dan memuaskan bagi *stakeholder* terkait.

### 3. Indikator Kinerja Ketiga: Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (%)

Capaian indikator kinerja “**Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti**” diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti dari hasil penyusunan kajian peta potensi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam, industri manufaktur, jasa dan kawasan, serta infrastruktur. Rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal disusun dalam rangka mensinergikan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal sektoral untuk mendorong realisasi investasi. Tindak lanjut penyusunan rekomendasi perencanaan pengembangan penanaman modal berupa usulan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal sektoral yang telah disampaikan kepada kepada *stakeholder* terkait. Perkembangan Target dan capaian kinerja “**Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti**” dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 10: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti”**

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         | %      | KATEGORI    |
|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------|-------------|
|  | TARGET     | CAPAIAN |        |             |
| <b>Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti</b>                  | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    | 100%       | 100     | 61%        | 66.7%   | 61%        | 68.9%   | 112,92 | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam</b>   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |        |             |
| Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti | 3 RK       | 3 RK    | 3 RK       | 3 RK    | 3 RK       | 3 RK    | 61%        | 60%     | 61%        | 73,3%   | 120    | Sangat Baik |



| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         | %     | KATEGORI    |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------|-------------|
|   | TARGET     | CAPAIAN |       |             |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</b>   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |       |             |
| Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Industri Manufaktur yang Ditindaklanjuti | 3 RK       | 3 RK    | 3 RK       | 3 RK    | 3 RK       | 3 RK    | 61%        | 73,3%   | 61%        | 73,3%   | 120   | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>  |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |       |             |
| Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan yang Ditindaklanjuti    | 61%        | 73,3%   | 61%        | 73,3%   | 61%        | 73,3%   | 61%        | 73,3%   | 61%        | 73,3%   | 120   | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |       |             |
| Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur yang Ditindaklanjuti       | 3 RK       | 3 RK    | 3 RK       | 3 RK    | 3 RK       | 3 RK    | 61%        | 60%     | 61%        | 60%     | 98,36 | Baik        |

Capaian indikator kinerja “**Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti**” Tahun 2024 sebesar 68,88% telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 61%, atau masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK** atau 112,92%. Pada indikator ini dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya yakni 2023, namun tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2023 dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan indikator. Perubahan indikator kinerja yang dilakukan sejak tahun 2023 dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas indikator kinerja menjadi hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan. Rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal diperoleh dari hasil penyusunan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

#### A. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam

1. Kajian Pengembangan Investasi Mineral Kritis Komoditas Seng (Zn) dalam menunjang Transisi Energi Hijau di Indonesia
2. Kajian Dampak Transisi Energi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
3. Kajian Pengembangan Investasi Budidaya Padi Terintegrasi Industri Pengolahan

#### B. Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

1. Kajian Potensi Pengembangan Penanaman Modal Pada Industri *Low Carbon Ammonia*
2. Kajian Potensi Pengembangan Penanamaan Modal Pada Industri *Chitosan*
3. Kajian Peluang Pengembangan Industri Pemurnian Logam Dari Slag Nikel Sebagai Bahan Baku Industri Lanjutan

#### C. Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan

1. Kajian Pengembangan Investasi Sektor Pendidikan Tinggi di Indonesia
2. Kajian Peluang Pengembangan Investasi *Integrated Senior Living and Wellness Tourism* di Indonesia
3. Kajian Pengembangan Kawasan Industri yang Mendukung Investasi Hijau dan Berkelanjutan

#### D. Direktorat Perencanaan Infrastruktur

1. Kajian Pengembangan Investasi Sektor Infrastruktur Pengolahan Limbah B3 Medis
2. Kajian Pengembangan Investasi Sektor Infrastruktur Pusat Data Hijau (*Green Data Center*)
3. Kajian Tinjauan Investasi Swasta pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Infrastruktur
4. Analisis Strategis: Percepatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka peningkatan investasi

Tindak lanjut atas penyusunan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang



Perencanaan Penanaman Modal dilaksanakan atas kajian pada tahun 2023 sebagai berikut:

**A. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam**

1. Kajian Pengembangan Investasi Hidrogen Hijau di Indonesia (Potensi dan Tantangan)
2. Kajian Pengembangan Investasi Budidaya Sorgum Terintegrasi Industri Pengolahannya
3. Kajian Pengembangan Investasi Mineral Kritis Komoditas Pasir Besi untuk Mendukung Industri Prekursor Baterai di Indonesia

**B. Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur**

1. Kajian Potensi Pengembangan Industri Pengolahan Nikel Murni
2. Kajian Pengembangan Industri Olefin dalam Kerangka Substitusi Impor
3. Kajian Pengembangan Industri Kompresor Perangkat Pendingin dalam rangka Substitusi Impor

**C. Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan**

1. Kajian Pengembangan Investasi Hidrogen Hijau di Indonesia (Potensi dan Tantangan)
2. Kajian Pengembangan Investasi Jasa Perdagangan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dalam rangka mendukung IKN
3. Kajian Peluang Pengembangan Investasi Sektor Jasa Pergudangan Modern di Indonesia

**D. Direktorat Perencanaan Infrastruktur**

1. Kajian Pengembangan Investasi Berkelanjutan pada Sektor Air Minum
2. Kajian Pengembangan Investasi Sektor Perumahan pada Lahan Milik Negara
3. Skema Investasi Kreatif Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Tol Trans-Sumatera
4. Analisis Strategis: Penguatan Keterlibatan Swasta (*Investor Engagement*) untuk Peningkatan Investasi Bidang Infrastruktur



#### 4. Indikator Kinerja Keempat: Persentase *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja “**Persentase *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang ditindaklanjuti**” diperoleh berdasarkan kegiatan penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. IPRO merupakan profil proyek yang siap untuk ditawarkan kepada investor yang memuat analisa kelayakan suatu proyek yang mencakup pemetaan terhadap potensi pengembangan, dukungan bahan baku, peluang pasar, lokasi potensial, prosedur dan regulasi terkait sektor, insentif yang dapat diberikan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kelayakan teknis dan finansial dengan tingkat analisis pra-studi kelayakan. Capaian indikator kinerja ini berupa persentase IPRO yang dipromosikan oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal maupun *stakeholder* terkait. Perkembangan Target dan capaian kinerja “**Persentase *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang ditindaklanjuti**” dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 11: Persentase Target dan Capaian Indikator Kinerja  
“Persentase Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang ditindaklanjuti”**

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|   | TARGET     | CAPAIAN |
| Persentase Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang ditindaklanjuti  | 100        | 100     | 100        | 100     | 100        | 100     | 61         | 70      | 61         | 66,7    |
| <b>Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam</b><br><br>Persentase Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang ditindaklanjuti bidang Industri dan Sumber Daya Alam Lainnya | 100        | 100     | 100        | 100     | -          | -       | -          | -       | -          | -       |
| Persentase Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang ditindaklanjuti bidang Industri dan Sumber Daya Alam   | -          | -       | -          | -       | 100        | 100     | 61         | 60      | 61         | 60      |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</b><br><br>Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal bidang Industri Manufaktur                   | 100        | 100     | 100        | 100     | 100        | 100     | 61         | 60      | 61         | 60      |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b><br><br>Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan   | -          | -       | -          | -       | 100        | 100     | 61         | 100     | 61         | 86,7    |

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|   | TARGET     | CAPAIAN |
| Penanaman Modal bidang Jasa dan Kawasan   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b><br>Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal bidang Infrastruktur | 100        | 1000    | 100        | 100     | 100        | 100     | 61         | 60      | 61         | 60      |

Capaian indikator kinerja “**Persentase Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang ditindaklanjuti**” Tahun 2024 sebesar 66,7% telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 61%, atau masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**. Adapun target dan capaian persentase IPRO yang ditindaklanjuti pada Tahun 2020 s.d Tahun 2022 menggunakan formula perhitungan kinerja yang berbeda dengan Tahun 2023, dimana pada sebelum Tahun 2023, perhitungan persentase menggunakan formulasi kinerja yang menekankan target dan pencapaian berupa jumlah IPRO yang dihasilkan (*output*) sedangkan mulai Tahun 2023, perhitungan persentase capaian menekankan ke jumlah IPRO yang ditindaklanjuti (*outcome*).

IPRO yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- A. **Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam**  
*Investment Project Ready to Offer (IPRO) Pengembangan Investasi Budidaya Ubi Kayu Terintegrasi Industri Pengolahannya*
- B. **Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur**  
*Investment Project Ready to Offer (IPRO) Eksipien Amilum dalam Formulasi Sediaan Obat*
- C. **Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan**
  1. *Investment Project Ready to Offer (IPRO) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bromo–Tengger–Semeru*
  2. *Investment Project Ready to Offer (IPRO) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Lombok-Gili Tramena*

#### D. Direktorat Perencanaan Infrastruktur

*Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kertajati Aircraft Maintenance Center (KAMC) Facility*

#### 5. Indikator Kinerja Kelima: Persentase Peta Peluang Investasi yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja “**Persentase Peta Peluang Investasi yang Ditindaklanjuti**” diperoleh berdasarkan persentase peta peluang investasi yang disusun oleh Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal yang siap dipromosikan. Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis dilakukan hingga tahap pra studi kelayakan proyek, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendetail terkait kelayakan suatu proyek baik dari aspek legal, teknis, keekonomian, dan finansial kepada investor. Capaian Indikator kinerja ini diperoleh dari persentase peta peluang investasi proyek prioritas strategis dalam mendukung IKN. Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Ditindaklanjuti” dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja**  
**“Percentase Peta Peluang Investasi yang Ditindaklanjuti”**

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020                |                           | TAHUN 2021                 |                            | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|  | TARGET                    | CAPAIAN                   | TARGET                     | CAPAIAN                    | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN |
| Percentase Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Ditindaklanjuti                            | 100%                      | 100%                      | 100%                       | 100%                       | 100%       | 100%    | 61%        | 80.50%  | 61%        | 95.56%  |
| Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan  | 23 Peta Peluang Investasi | 23 Peta Peluang Investasi | 25 Dok Pra Studi Kelayakan | 25 Dok Pra Studi Kelayakan | -          | -       | -          | -       | -          | -       |
| Jumlah Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Siap Ditawarkan                                     |                           |                           |                            |                            |            |         |            |         |            |         |
| Percentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti   |                           |                           | -                          | -                          | -          | -       | 61%        | 61%     | 61%        | 87%     |
| Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam  |                           |                           |                            |                            | 100%       | 100%    |            |         |            |         |
| Percentase Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Bidang Sumber Daya Alam yang Siap Ditawarkan    |                           |                           | -                          | -                          |            |         |            |         | -          | -       |
| Percentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti   |                           |                           | -                          | -                          | -          | -       | 61%        | 100%    | 61%        | 100%    |
| Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur   |                           |                           |                            |                            |            |         |            |         |            |         |
| Percentase Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Bidang Industri Manufaktur yang Siap Ditawarkan |                           |                           | -                          | -                          | 100%       | 100%    |            |         | -          | -       |

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |
|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|  | TARGET     | CAPAIAN |
| Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti |            |         | -          | -       | -          | -       | 61%        | 100%    | 61%        | 100%    |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>                  |            |         | -          | -       | -          | -       | 61%        | 61%     | -          | -       |
| Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |

**Tabel 13: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja  
“Percentase Peta Peluang Investasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2024”**

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2024 |         |      |             |
|---|------------|---------|------|-------------|
|   | TARGET     | CAPAIAN | %    | KATEGORI    |
| Percentase Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Ditindaklanjuti | 61%        | 95.56%  | 120% | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>                                    |            |         |      |             |
| Percentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti                      | 61%        | 87%     | 100% | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam</b>                                    |            |         |      |             |
| Percentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti                      | 61%        | 100%    | 120% | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</b>                                 |            |         |      |             |
| Percentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti                      | 61%        | 100%    | -    | -           |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>                                       |            |         |      |             |
| Percentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti                      | -          | -       | -    | -           |

Capaian indikator kinerja “**Percentase Peta Peluang Investasi yang Ditindaklanjuti**” Tahun 2024 sebesar 95.56% telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 61%, atau masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK** (120%). Pada tahun 2024, daftar proyek dalam penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang dilakukan oleh 3 (tiga) Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

**Tabel 14: Daftar Proyek Penyusunan Peta Peluang Investasi di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024**

| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN</b>    |  |
|---|--|
| 1   | Pembangunan <i>Smart-Eco Industrial Park</i> |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM</b>    |  |
| 2   | Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan       |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR</b> |  |
| 3   | Industri Katoda Baterai EV                   |

## 6. Indikator Kinerja Keenam: Persentase Rencana Proyek Penanaman Modal yang Terfasilitasi

Capaian indikator kinerja “**Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi**” diperoleh berdasarkan kegiatan Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal dalam rangka pemberian informasi terkait kebijakan dan rencana pengembangan sektor serta penyelesaian masalah kepada calon investor potensial sebelum mengajukan perizinan berusaha. Indikator kinerja ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masukan dari calon investor terkait potensi pengembangan sektor-sektor baru serta kebijakan yang menghambat di bidang penanaman modal. Capaian indikator kinerja ini berupa persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi oleh unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Perkembangan target dan capaian kinerja “**Persentase Rencana Proyek Penanaman Modal yang Terfasilitasi**” dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 15: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja**  
**“Percentase Rencana Proyek Penanaman Modal yang Terfasilitasi”**

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020                |                           | TAHUN 2021                 |                            | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         | %    | KATEGORI    |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|-------------|
|   | TARGET                    | CAPAIAN                   | TARGET                     | CAPAIAN                    | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN |      |             |
| Persentase Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Ditindaklanjuti                         | 100%                      | 100%                      | 100%                       | 100%                       | 100%       | 100%    | 61%        | 80.50%  | 61%        | 95.56%  | 120% | Sangat Baik |
| Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan   | 23 Peta Peluang Investasi | 23 Peta Peluang Investasi | 25 Dok Pra Studi Kelayakan | 25 Dok Pra Studi Kelayakan | -          | -       | -          | -       | -          | -       | -    | -           |
| Jumlah Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Siap Ditawarkan                                  |                           |                           |                            |                            |            |         |            |         |            |         |      |             |
| Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti  |                           |                           | -                          | -                          | -          | -       | 61%        | 61%     | 61%        | 87%     | 100% | Sangat Baik |
| Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam   |                           |                           |                            |                            | 100%       | 100%    |            |         |            |         |      | -           |
| Persentase Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Bidang Sumber Daya Alam yang Siap Ditawarkan |                           |                           | -                          | -                          |            |         | -          | -       | -          | -       | -    | -           |
| Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti  |                           |                           | -                          | -                          | -          | -       | 61%        | 100%    | 61%        | 100%    | 120% | Sangat Baik |
| Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur  |                           |                           | -                          | -                          | 100%       | 100%    |            |         | -          | -       | -    | -           |

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         | % | KATEGORI |
|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---|----------|
|  | TARGET     | CAPAIAN |   |          |
| Persentase Peta Peluang Investasi Prioritas Proyek Strategis Bidang Industri Manufaktur yang Siap Ditawarkan |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |   |          |
| Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti   |            |         | -          | -       | -          | -       | 61%        | 100%    | 61%        | 100%    | - | -        |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>  |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |   |          |
| Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti   |            |         | -          | -       | -          | -       | 61%        | 61%     | -          | -       | - | -        |

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020 |           | TAHUN 2021 |           | TAHUN 2022 |          | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|
|   | TARGET     | CAPAIAN   | TARGET     | CAPAIAN   | TARGET     | CAPAIAN  | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN |
| Persentase Rencana Proyek Penanaman Modal yang Terfasilitasi                            | 100%       | 100%      | 100%       | 100%      | 100%       | 100%     | 100%       | 200%    | 100%       | 167%    |
| Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam   | 10 Proyek  | 10 Proyek | 10 Proyek  | 10 Proyek | -          | -        | -          | -       | -          | -       |
| Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal bidang sumber daya alam                |            |           |            |           | -          | -        | -          | -       | -          | -       |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang sumber daya alam yang terfasilitasi    | -          | -         | -          | -         | 100%       | 120%     | 100%       | 300%    | 100%       | 300%    |
| Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur  | 3 Proyek   | 5 Proyek  | 10 Proyek  | 10 Proyek | -          | -        | -          | -       | -          | -       |
| Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal bidang industri manufaktur             |            |           |            |           | -          | -        | -          | -       | -          | -       |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang industri manufaktur yang terfasilitasi | -          | -         | -          | -         | 100%       | 142,86 % | 100%       | 300%    | 100%       | 167%    |
| Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan   | 3 Proyek   | 3 Proyek  | 10 Proyek  | 10 Proyek | -          | -        | -          | -       | -          | -       |

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |           | TAHUN 2021 |           | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|  | TARGET     | CAPAIAN   | TARGET     | CAPAIAN   | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN |
| Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal bidang jasa dan kawasan             |            |           |            |           |            |         |            |         |            |         |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang jasa dan kawasan yang terfasilitasi | -          | -         | -          | -         | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>  | 10 Proyek  | 13 Proyek | 10 Proyek  | 10 Proyek |            |         |            |         |            |         |
| Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal bidang infrastruktur                | -          | -         | -          | -         | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang infrastruktur yang terfasilitasi    | -          | -         | -          | -         | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    | 100%       | 100%    |

**Tabel 16: Target dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rencana Proyek Penanaman Modal yang Terfasilitasi” Tahun 2024**

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2024 |         |     |             |
|---|------------|---------|-----|-------------|
|   | TARGET     | CAPAIAN | %   | KATEGORI    |
| <b>Persentase Rencana Proyek Penanaman Modal yang Terfasilitasi</b>                     | 100%       | 167%    | 120 | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam</b>  |            |         |     |             |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang sumber daya alam yang terfasilitasi    | 100%       | 300%    | 120 | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</b>                                       |            |         |     |             |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang industri manufaktur yang terfasilitasi | 100%       | 167%    | 120 | Sangat Baik |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>  |            |         |     |             |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang jasa dan kawasan yang terfasilitasi    | 100%       | 100%    | 100 | Sangat Baik |

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2024 |         |     |             |
|---|------------|---------|-----|-------------|
|   | TARGET     | CAPAIAN | %   | KATEGORI    |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>                                       |            |         |     |             |
| Persentase rencana proyek penanaman modal bidang infrastruktur yang terfasilitasi | 100%       | 100%    | 100 | Sangat Baik |

Capaian indikator kinerja “**Persentase Rencana Proyek Penanaman Modal yang Terfasilitasi**” Tahun 2024 sebesar 167% telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, atau masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**. Berdasarkan data tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian indikator kinerja ini selalu mencapai target dan mendapatkan kategori **SANGAT BAIK**.

#### 7. Indikator Kinerja Ketujuh: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja “**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)**” hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi AKIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan menggunakan instrumen yang dirumuskan oleh Tim Menpan RB. Nilai ini dihitung berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian AKIP, yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Perkembangan target dan capaian kinerja “**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 17: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja  
“Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi  
Bidang Perencanaan Penanaman Modal”**

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |        |             | (%) |
|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------|-------------|-----|
|  | TARGET     | CAPAIAN | %      | KATEGORI    |     |
| <b>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b> | -          | -       | -          | -       | -          | -       | 80%        | 79%     | 80%        | 79,8%   | 99,75% | Sangat Baik |     |
| <b>Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam</b>   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |        |             |     |
| Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti            | -          | -       | -          | -       | -          | -       | 80%        | 75%     | 80%        | 88%     | 110%   | Sangat Baik |     |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</b>  |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |        |             |     |
| Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti            | -          | -       | -          | -       | -          | -       | 80%        | 75%     | 80%        | 88%     | 110%   | Sangat Baik |     |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |        |             |     |
| Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti            | -          | -       | -          | -       | -          | -       | 80%        | 75%     | 80%        | 88%     | 110%   | Sangat Baik |     |

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |         | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |      |             | (%) |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|-------------|-----|
|   | TARGET     | CAPAIAN | %    | KATEGORI    |     |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |      |             |     |
| Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti | -          | -       | -          | -       | -          | -       | 80%        | 75%     | 80%        | 88%     | 110% | Sangat Baik |     |

Capaian indikator kinerja “**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” Tahun 2024 sebesar 79,8% dari target sebesar 80%, atau capaiannya sebesar 99,75%, termasuk ke dalam kategori **BAIK**.

## 8. Indikator Kinerja Kedelapan: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)

Capaian indikator kinerja “**Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Pengelolaan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengutamakan prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, serta keterbukaan. Pendekatan penganggaran harus meliputi: *unified budgeting* (anggaran terpadu) yakni semua kegiatan instansi Pemerintah dalam APBN disusun secara terpadu.

Selain itu, pengelolaan anggaran harus berbasis kinerja yang menghubungkan antara anggaran negara/pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan/*output* dan *outcome*. Perkembangan target dan capaian kinerja “Nilai

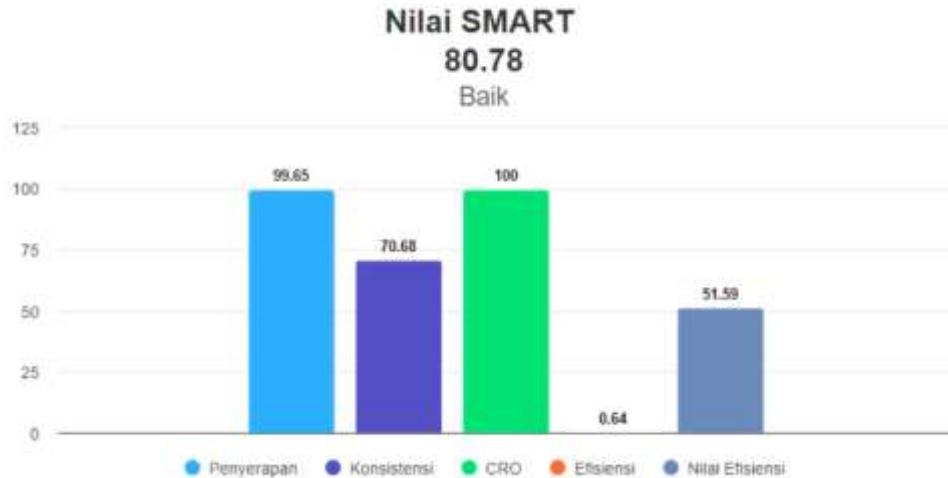
Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal" dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18: Target dan Capaian Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal"**

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |       |          |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------|----------|
|   | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN | %     | KATEGORI |
| Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal                      | 90         | 85,18   |            |         |            | 4       | 3     | Baik     |
| Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam   |            |         |            |         |            |         |       |          |
| Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Industri dan Sumber Daya Alam Lainnya | 90         | -       |            |         |            | -       | -     | -        |
| Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam                      | -          | 82,96   |            |         |            | 81,30   | 90,33 | Baik     |
| Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur  |            |         |            |         |            |         |       |          |
| Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufktur                    | 90         | 84,62   | 90         |         |            | 81,69   | 90,77 | Baik     |
| Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan   | 90         | 80,48   | 90         |         |            | 80,69   | 89,66 | Baik     |

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |         |       |          |
|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------|----------|
|  | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN | TARGET     | CAPAIAN | %     | KATEGORI |
| Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 90         | 85,18   |            |         |            | 4       | 3     | Baik     |
| Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan |            |         |            |         |            |         |       |          |
| Direktorat Perencanaan Infrastruktur                                   |            |         |            |         |            |         |       |          |
| Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur    | 90         | 76,21   | 90         |         |            | 77,96   | 86,62 | Baik     |

Capaian Indikator Kinerja “**Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” sebesar 3 dari target 4 dengan nilai 77,45 dan masuk ke dalam kategori **CUKUP**. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur berdasarkan Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 3 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur berdasarkan SMART Kementerian Keuangan Tahun 2023**

#### 9. Indikator Kinerja Kesembilan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal** merupakan Indikator Kinerja baru di Tahun Anggaran 2023.

Capaian Indikator Kinerja “**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” sebesar 79,89, yaitu sebesar 92,90% dari target yang ditetapkan masuk ke dalam kategori **BAIK**. Capaian Indikator Kinerja ini menunjukkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik berdasarkan penguatan 8 (delapan) indikator IKPA yaitu revisi DIPA; deviasi Hal III DIPA; penyerapan anggaran; belanja kontraktual; penyelesaian tagihan; pengelolaan UP/TUP; dispensasi SPM; dan capaian output.

Perkembangan target dan capaian kinerja “**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 19: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal”**

| INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2023 |         |       |          | TAHUN 2024 |         |       |          |
|---|------------|---------|-------|----------|------------|---------|-------|----------|
|   | TARGET     | CAPAIAN | %     | KATEGORI | TARGET     | CAPAIAN | %     | KATEGORI |
| Nilai Kinerja Anggaran (NKA)<br>Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 85         | 69,17   | 81,38 | Baik     | 86         | 79,89   | 92,90 | Baik     |

Sejak penetapan Indikator Kinerja “**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” pada kinerja Kedeputian Tahun 2023, terdapat perbaikan capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Perencanaan Penanama Modal di Tahun 2024 melalui peningkatan dari 69,17 menjadi 92,90.

#### 10. Indikator Kinerja Kesepuluh: Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)

Indikator kinerja “**Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” diperoleh berdasarkan perbandingan antara nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan periode sebelumnya, yaitu T.A. 2023, dengan angka realisasi anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal T.A. 2023. Pada penilaian kinerja Tahun 2024 ini, capaian Indikator Kinerja “**Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**” sebesar 120% masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**. Nilai Capaian Indikator Kinerja ini sebesar 120% dikarenakan nilai persentase temuan di bawah 5% yaitu 2,59% atau senilai Rp 2.503.579.222,- dari total realisasi anggaran sebesar Rp 96.589.425.222.

Nilai temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut ini merupakan target dan capaian kinerja **“Percentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal”** pada periode 5 (lima) tahun terakhir:

**Tabel 20: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja “Percentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal”**

| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |          | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |        |
|--|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|
|  | TARGET     | CAPAIAN | CAPAIAN    | TARGET   | CAPAIAN    | TARGET  | TARGET     | CAPAIAN | CAPAIAN    | TARGET |
| <b>Percentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b>   | 5%         | 0       | 5%         | 0,0018 % | 5%         | 1,499 % | 5%         | 2,59%   | 5%         | 0,95%  |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Sumber Daya Alam</b><br><br>Percentase Temuan BPK atas Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya | 5%         | 0       |            |          |            |         |            |         |            |        |
| <b>Percentase Temuan BPK atas Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam</b>   |            |         | ≤ 5%       | 0%       | 5%         | 0%      | 5%         | 2,83%   | 5%         | 0,95%  |
| <b>Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</b>  | 5%         | 0       | 5%         | 0        | 5%         | 0%      | 5%         | 2,73%   | 5%         | 0,96%  |



| INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2020 |         | TAHUN 2021 |        | TAHUN 2022 |         | TAHUN 2023 |         | TAHUN 2024 |        |
|--|------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|
|  | TARGET     | CAPAIAN | CAPAIAN    | TARGET | CAPAIAN    | TARGET  | TARGET     | CAPAIAN | CAPAIAN    | TARGET |
| Persentase Temuan BPK atas Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur |            |         |            |        |            |         |            |         |            |        |
| <b>Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>   |            |         |            |        |            |         |            |         |            |        |
| Persentase Temuan BPK atas Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan    | 5%         | 0       | 5%         | 0,002% | 5%         | 1,499 % | 5%         | 0%      | 5%         | 0,90%  |
| <b>Direktorat Perencanaan Infrastruktur</b>  |            |         |            |        |            |         |            |         |            |        |
| Persentase Temuan BPK atas Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur       | 5%         | 0       | 5%         | 0      | 5%         | 0       | 5%         | 0       | 5%         | 1,00%  |

Secara keseluruhan, Capaian Indikator Kinerja **“Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal”** dalam 5 (lima) tahun terakhir masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**, baik untuk Satuan Kerja maupun untuk 4 (empat) Unit Kerja.

## D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.241.971.460 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau mencapai 93,94% dari total pagu anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp25.805.472.000 (dua puluh miliar delapan ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Rincian realisasi penyerapan

anggaran di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 21: Detail Realisasi Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024**

| No. | Uraian   | Alokasi Anggaran      | Anggaran setelah Revisi | Realisasi Anggaran    | %             |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|     | <b>Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b> | <b>54.781.254.000</b> | <b>25.805.472.000</b>   | <b>24.241.971.460</b> | <b>93,94%</b> |
| 1   | Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam          | 16.485.000.000        | 8.062.522.000           | 7.538.814.036         | 93,50%        |
| 2   | Direktorat Perencanaan Manufaktur                | 16.985.000.000        | 8.556.848.000           | 7.923.077.509         | 92,59%        |
| 3   | Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan          | 10.490.000.000        | 6.104.848.000           | 5.806.729.937         | 95,12%        |
| 4   | Direktorat Perencanaan Infrastruktur             | 10.821.254.000        | 3.081.254.000           | 2.973.349.978         | 96,50%        |

Pencapaian realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 93,94% berada pada kategori **SANGAT BAIK**.

Perkembangan penyerapan anggaran pada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal beserta masing-masing Direktorat dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 22: Perkembangan Pagu dan Realisasi Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2019 – 2023**

| Tahun       | Unit Kerja   | Anggaran               |                        | %             |
|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
|             |  | Pagu                   | Realisasi              |               |
| <b>2020</b> | <b>Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b>                 | <b>97,302,198,000</b>  | <b>95,004,732,907</b>  | <b>97.64%</b> |
|             | 1 Direktorat Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya | 7,672,845,000          | 6,681,580,072          | 87.08%        |
|             | 2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur                     | 1,497,679,000          | 1,477,182,519          | 98.63%        |
|             | 3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan                        | 86,707,665,000         | 85,493,063,667         | 98.60%        |
|             | 4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur                           | 1,424,009,000          | 1,352,906,649          | 95.01%        |
| <b>2021</b> | <b>Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b>                 | <b>105,750,768,000</b> | <b>105,094,818,165</b> | <b>99.38%</b> |
|             | 1 Direktorat Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya | 3,921,314,000          | 3,855,395,793          | 98.32%        |
|             | 2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur                     | 4,291,803,000          | 4,154,251,433          | 96.80%        |



| Tahun       | Unit Kerja                                       | Anggaran       |                | %      |
|-------------|--|----------------|----------------|--------|
|             |  | Pagu           | Realisasi      |        |
|             | 3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan        | 94,003,621,000 | 93,611,876,177 | 99.58% |
|             | 4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur           | 3,534,030,000  | 3,473,294,762  | 98.28% |
| <b>2022</b> | <b>Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b> | 98,235,004,000 | 96,592,781,222 | 98.33% |
|             | 1 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam        | 45,234,478,000 | 44,299,031,489 | 97.93% |
|             | 2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur     | 46,588,317,000 | 45,897,698,690 | 98.52% |
|             | 3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan        | 2,999,425,000  | 2,993,697,147  | 99.81% |
|             | 4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur           | 3,412,784,000  | 3,402,353,896  | 99.69% |
| <b>2023</b> | <b>Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b> | 58,213,774,000 | 58,010,256,285 | 99.65% |
|             | 1 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam        | 14,478,873,000 | 14,315,633,290 | 98.87% |
|             | 2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur     | 15,277,265,000 | 15,252,959,937 | 99.84% |
|             | 3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan        | 14,537,207,000 | 14,528,713,621 | 99.94% |
|             | 4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur           | 13,920,429,000 | 13,912,949,437 | 99.95% |
| <b>2024</b> | <b>Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal</b> | 25,805,472,000 | 24,241,971,460 | 93.94% |
|             | 1 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam        | 8,062,522,000  | 7,538,814,036  | 93.50% |
|             | 2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur     | 8,556,848,000  | 7,923,077,509  | 92.59% |
|             | 3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan        | 6,104,848,000  | 5,806,729,937  | 95.12% |
|             | 4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur           | 3,081,254,000  | 2,973,349,978  | 96.50% |

## E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS);
2. Data pagu anggaran; dan
3. Data realisasi anggaran.

Efisiensi anggaran terjadi jika sumber daya dikeluarkan melebihi capaian kinerja keluaran tertentu, maka efisiensi rendah. Sebaliknya, jika sumber daya yang dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja tertentu, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mencapai 10,31% yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp25,805,472,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp24,241,971,460 dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 104,25%. Sedangkan apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran secara umum pencapaian sasaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal telah termasuk kategori efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.480.745.582 dan realisasi anggaran mencapai Rp3.305.972.690 dengan persentase realisasi mencapai 96,44% dan NPS mencapai 102,79% atau efisiensi anggaran telah mencapai 6,35%.
2. Sasaran Program “Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.515.788.665 dan realisasi anggaran mencapai Rp16.463.077.380 dengan persentase realisasi mencapai 93,99% dan NPS mencapai 113,05% atau efisiensi anggaran telah mencapai 19,06%.
3. Sasaran Program “Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.808.937.753 dan realisasi anggaran mencapai Rp4.472.921.390 dengan persentase realisasi mencapai 95,07% dan NPS mencapai 96,91% atau efisiensi anggaran telah mencapai 1,81%.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran pada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 23: Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

| Sasaran Program   | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp)        | % Realisasi  | NPS           | % Efisiensi  |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| SP-1 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal             | 3.480.745.582         | 3.305.972.690         | 96,44        | 102,79        | 6,35         |
| SP-2 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal  | 17.515.788.665        | 16.463.077.380        | 93,99        | 113,05        | 19,06        |
| SP-3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 4.808.937.753         | 4.472.921.390         | 95,07        | 96,91         | 1,81         |
| <b>Total</b>  | <b>25,805,472,000</b> | <b>24,241,971,460</b> | <b>93,94</b> | <b>104,25</b> | <b>10,31</b> |

## BAB IV

### INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun 2024, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal melakukan berbagai inovasi yang didasarkan pada kebutuhan unit kerja Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam, Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur, Direktorat Perencanaan Infrastruktur dan Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal antara lain:

#### A. PENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pada tahap perencanaan, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal melakukan koordinasi awal dengan para *stakeholder* terkait di lingkungan pemerintah dan swasta dalam rangka pemilihan tematik kajian dan *investment project ready to offer*. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan atas isu-isu terkini yang menjadi highlight pada pengembangan penanaman modal. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal juga melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, para pelaku usaha/asosiasi, dan pemerintah daerah dalam forum-forum diskusi untuk mendapatkan data dan regulasi yang *up to date* dan relevan dengan dokumen perencanaan yang sedang disusun. Pada tahap akhir, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Selain itu, peningkatakan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal dapat dilakukan melalui berbagai upaya di antaranya dengan melakukan analisis dukungan proyek terhadap pencapaian pilar SDGs dan aspek keberlanjutan dari Panduan Investasi Lestari dan menjaring masukan dari calon *offtaker/pelaku usaha* melalui *market consultation*. Selain itu, peningkatan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia/*capacity building*.

## B. PERLUNYA KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT

Koordinasi dengan *Stakeholder* terkait diperlukan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi aspek perencanaan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menciptakan daya dukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama terkait pengembangan wilayah dan sektor prioritas. Komitmen dan konsolidasi percepatan penyiapan dan pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal yang prospektif untuk ditawarkan maupun dikerjasamakan sehingga dapat terealisasi bagi peningkatan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

## C. PENGEMBANGAN USER INTERFACE DI WEBSITE PIR UNTUK PETA PELUANG INVESTASI

Salah satu strategi untuk meningkatkan kemudahan dalam mengakses proyek-proyek Peta Peluang Investasi (PPI) yang disusun oleh Kedeputian Perencanaan adalah melalui website: <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/>. Pada tahun 2024, telah dilakukan *update* atau pembaharuan pada halaman website PIR. Dalam fitur kontak dan pengunduhan dokumen juga telah dilakukan pendataan sehingga tim dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat melakukan tindak lanjut terhadap *potential investor* yang berminat.

## D. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAGI PEGAWAI DI UNIT KEDEPUTIAN BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan diadakan berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), *workshop*, *short course*, sosialisasi, penyediaan peningkatan jenjang pendidikan buat SDM dan lain-lain. Pegawai di unit Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan tersebut guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

## E. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi program kegiatan di lingkungan Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal sehingga dapat berjalan tepat

sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah (Renstra) dan perjanjian kinerja (Penkin). Selain itu, untuk memperkuat pemantauan perkembangan kegiatan penanaman modal secara nasional maka diperlukan suatu mekanisme atau sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengidentifikasi kegiatan perencanaan nasional dan hambatan yang terjadi dalam realisasi pelaksanaannya.

## BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta capaian indikator kinerja utama dalam rangka mencapai sasaran strategis. Secara umum, target kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal telah tercapai, bahkan terdapat indikator yang melebihi target. Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah:

1. Perlunya sinergi yang berkesinambungan dalam menindaklanjuti hasil penyusunan kajian di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal.
2. Terjadinya *refocusing* dan *self blocking* anggaran beberapa kali sepanjang tahun berjalan yang menyebabkan adanya perubahan strategi pencapaian output.
3. Permasalahan terkait sumber daya manusia, yaitu terdapat kekosongan sumber daya manusia terutama pada jabatan tertentu.
4. Keterbatasan data dan informasi pendukung sehingga persiapan pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan menjadi kurang optimal. Selain itu, beberapa *stakeholder* terkait dinilai masih kurang responsif ketika dilakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Dalam mengantisipasi permasalahan yang sama terjadi di masa mendatang, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal akan melakukan beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal.
2. Perlunya koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
3. Pengembangan *user interface* di Website PIR untuk peta peluang investasi.
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi pegawai di unit Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal.
5. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan perencanaan penanaman modal.

Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2024 kiranya dapat menjadi referensi bagi seluruh personil Deputi Bidang Bidang Perencanaan Penanaman Modal, agar dapat menjadi bahan evaluasi, sehingga dapat melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## LAMPIRAN

**Tabel 24:** Rincian Dokumen Perencanaan Pengembangan yang Disusun oleh Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Data Dukung Indikator Kinerja Ketiga)

| NO   | JUDUL KAJIAN  | TUJUAN  | PENYUSUN                  | KETERANGAN (Metode/Lokasi)  |
|--|---|---|---------------------------|---|
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM</b> |   |   |                           |   |
| 1.   | Kajian Pengembangan Investasi Mineral Kritis Komoditas Seng (Zn) dalam menunjang Transisi Energi Hijau di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Kajian Peluang Pengembangan Investasi Mineral Kritis Komoditas Seng (Zn) dalam menunjang Transisi Energi Hijau di Indonesia</li> <li>Mengidentifikasi Kebutuhan Kebijakan yang dapat mendukung Pengembangan Investasi Mineral Kritis Komoditas Seng (Zn) dalam menunjang Transisi Energi Hijau di Indonesia</li> </ul> | CV Prima Akbar Mineratama | <p>Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi: Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah</p> |
| 2.   | Kajian Dampak Percepatan Transisi Energi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Kajian Dampak Percepatan Transisi Energi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi</li> <li>Mengidentifikasi dampak positif dari percepatan transisi energi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi</li> </ul>   | PT Daya Integra Nusantara | <p>Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p>   |



| NO | JUDUL KAJIAN   | TUJUAN   | PENYUSUN            | KETERANGAN (Metode/Lokasi)  |
|----|--|--|---------------------|---|
|    |  |  |                     | Lokasi: -   |
| 3. | Kajian Pengembangan Investasi Budidaya Padi Terintegrasi Industri Pengolahan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan Kajian Pengembangan Investasi Budidaya Padi Terintegrasi Industri Pengolahan</li><li>• Mengidentifikasi Kebutuhan Kebijakan yang dapat mendukung Pengembangan Investasi Budidaya Padi Terintegrasi Industri Pengolahan</li><li>• Mengidentifikasi usaha budidaya padi yang terintegrasi dengan industri pengolahan serta mendukung pengembangan ekonomi sirkuler untuk meningkatkan daya saing daerah, pembangunan ekonomi lokal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan.</li></ul> | PT Prima Kelola IPB | <p>Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi:</p> <p>Konawe, Sulawesi Tenggara</p> |

#### DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

|    |   |   |                               |   |
|----|---|---|-------------------------------|---|
| 4. | Kajian Potensi Pengembangan Industri Pemurnian Logam dari Slag Nikel untuk Bahan Baku Industri Lanjutan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kajian disusun untuk mengetahui potensi pengolahan limbah dari industri smelter nikel dan pasarnya.</li><li>• Kajian ini juga mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 melalui</li></ul> | PT Xingular Inovasi Teknologi | <p>Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait,</p> |
|----|---|---|-------------------------------|---|



| NO | JUDUL KAJIAN   | TUJUAN   | PENYUSUN             | KETERANGAN (Metode/Lokasi)   |
|----|--|--|----------------------|--|
|    |  | peningkatan kinerja sektor industri serta mendukung Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goal</i> (TPB/SDGs) telah memasuki tahun ke-6.  |                      | serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.  |
| 5. | Kajian Potensi Pengembangan Penanaman Modal pada Industri Low Carbon Ammonia | <ul style="list-style-type: none"><li>Menganalisis posisi industri <i>low carbon ammonia</i> di Indonesia dan keterkaitan industri <i>low carbon ammonia</i> dalam negeri pada rantai nilai global serta potensi pengembangan dan penguatan investasi.</li><li>Selain itu, kajian ini dapat menyajikan informasi yang komprehensif terkait pengembangan investasi industri <i>low carbon ammonia</i> dalam penggunaanya sebagai bahan baku di industri pupuk serta merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi kebijakan, serta lokasi potensial.</li></ul> | PT LAPI ITB          | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. |
| 6. | Kajian Potensi Pengembangan Penanaman Modal Pada                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Menganalisis posisi industri <i>chitosan</i> di Indonesia dan keterkaitan industri <i>chitosan</i> dalam negeri pada rantai</li></ul>  | PT Data Aksara Matra | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk   |



| NO | JUDUL KAJIAN      | TUJUAN  | PENYUSUN | KETERANGAN (Metode/Lokasi)  |
|----|-------------------|---|----------|---|
|    | Industri Chitosan | <p>nilai global serta potensi pengembangan dan penguatan investasi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selain itu, kajian ini dapat menyajikan informasi yang komprehensif terkait pengembangan investasi industri <i>chitosan</i> dalam pemanfaatan limbah dan melakukan analisis bahan baku alternatif untuk pembuatan <i>chitosan</i> serta merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi kebijakan, serta lokasi potensial.</li></ul> |          | study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. |

**DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN**

|    |   |  |                                |  |
|----|---|--|--------------------------------|--|
| 1. | Kajian Pengembangan Investasi Sektor Pendidikan Tinggi di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan investasi sektor Pendidikan Tinggi di Indonesia</li><li>• Tersedianya data dan informasi terkait peluang investasi sektor Pendidikan Tinggi di Indonesia</li></ul> | PT. Andalan Rureka Consultindo | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. |
| 2. | Kajian Peluang Pengembangan Investasi                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun rekomendasi kebijakan yang</li></ul>  | PT IDI Kajang Consultants      | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan.   |



| NO  | JUDUL KAJIAN  | TUJUAN  | PENYUSUN               | KETERANGAN (Metode/Lokasi)   |
|---|---|---|------------------------|--|
|   | Integrated Senior Living and Wellness Tourism di Indonesia                              | <p>relevan dengan kebutuhan pengembangan investasi Integrated Senior Living and Wellness Tourism di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya data dan informasi terkait peluang investasi Integrated Senior Living and Wellness Tourism di Indonesia</li></ul> |                        | Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.  |
| 3.  | Kajian Pengembangan Kawasan Industri yang Mendukung Investasi Hijau dan Berkelanjutan   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan Kajian Peluang Pengembangan Investasi Sektor Jasa Pergudangan Modern di Indonesia</li><li>• Mengidentifikasi Kebutuhan Kebijakan yang dapat mendukung Pengembangan Investasi Sektor Jasa Pergudangan Modern di Indonesia</li></ul>    | PT. Gamma Metrics      | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR</b> |   |   |                        |  |
| 1.  | Kajian Pengembangan Investasi Sektor Infrastruktur Pusat Data Hijau (Green Data Center) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan gambaran komprehensif dan mendetail terkait pengembangan infrastruktur pusat data hijau (green data center)</li><li>• Merumuskan usulan strategis, rekomendasi</li></ul>   | PT Generasi Cinta Bumi | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan  |



| NO | JUDUL KAJIAN  | TUJUAN   | PENYUSUN                    | KETERANGAN (Metode/Lokasi)   |
|----|---|--|-----------------------------|--|
|    |   | dan kebijakan kepada K/L terkait dan pemerintah daerah mengenai pengembangan infrastruktur Pusat Data Hijau (Green Data Center)  |                             | informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.<br><br>Lokasi : Seluruh Indonesia   |
| 2. | Kajian Pengembangan Investasi Sektor Infrastruktur Pengolahan Limbah B3 Medis | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya data dan informasi yang komprehensif berupa potensi pengembangan investasi sektor infrastruktur pengolahan limbah B3 medis dalam bentuk kajian.</li><li>• Pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kebijakan investasi dan fasilitas yang didapat.</li><li>• Sebagai rekomendasi kebijakan atas pengembangan investasi sektor infrastruktur pengolahan limbah B3 medis.</li></ul> | PT Peduli Lestari Indonesia | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.<br><br>Lokasi : Seluruh Indonesia |
| 3. | Kajian Pengembangan Analisis Stratejik: Strategi Percepatan                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya data dan informasi yang komprehensif terkait strategi percepatan</li></ul>   | PT Mores Data Analatika     | Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk   |



| NO | JUDUL KAJIAN  | TUJUAN   | PENYUSUN  | KETERANGAN (Metode/Lokasi)   |
|----|---|--|-----------|--|
|    | Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Rangka Peningkatan Investasi | <p>pelaksanaan proyek KPBU sektor infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait rekomendasi kebijakan dalam percepatan pelaksanaan proyek KPBU sektor infrastruktur di Indonesia.</li></ul>   |           | <p>study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi :</p> <p>Seluruh Indonesia</p>  |
| 4. | Kajian Tinjauan Investasi Swasta Pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Infrastruktur                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya gambaran komprehensif dan mendetail terkait PSN bidang infrastruktur non-APBN serta melakukan tinjauan atas pelaksanaannya .</li><li>• Tersusunnya usulan strategi, rekomendasi, dan kebijakan kepada K/L terkait dan pemerintah daerah mengenai implementasi pembangunan proyek infrastruktur non-APBN.</li></ul> | Swakelola | <p>Penyusunan kajian dilaksanakan secara swakelola. Tahapan penyusunan dokumen kajian, di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi :</p> <p>Seluruh Indonesia</p> |



**Tabel 25:** Rincian Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang Disusun oleh Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Data Dukung Indikator Kinerja Keempat)

| NO   | JUDUL DOKUMEN IPRO   | TUJUAN  | PENYUSUN               | KETERANGAN (Metode/Lokasi)   |
|--|--|---|------------------------|--|
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM</b> |  |   |                        |  |
| 1  | Investment Project Ready to Offer (IPRO) Pengembangan Investasi Budidaya Ubi Kayu Terintegrasi Industri Pengolahan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun profil proyek yang siap untuk ditawarkan kepada investor yang memuat tentang studi kelayakan suatu proyek yang mencakup pemetaan terhadap potensi pengembangan, dukungan bahan baku, peluang pasar, lokasi potensial, prosedur dan regulasi terkait sektor, insentif yang dapat diberikan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kelayakan teknis dan finansial dengan tingkat analisis pra-studi kelayakan.</li><li>• Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan daya saing industri pati dalam negeri, dan meningkatkan perekonomian daerah.</li></ul> | Fakultas Pertanian IPB | <p>Penyusunan IPRO melibatkan tenaga ahli jasa konsultan, dengan tahapan penyusunan di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi: Jawa Timur</p> |



| NO  | JUDUL DOKUMEN IPRO  | TUJUAN   | PENYUSUN              | KETERANGAN (Metode/Lokasi)  |
|---|---|--|-----------------------|---|
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR</b> |   |  |                       |   |
| 2   | IPRO Eksipien Amilum Dalam Formulasi Sediaan Obat   | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun profil proyek terkait pengembangan investasi industri eksipien amilum dalam formulasi sediaan obat yang terdiri dari analisis hukum dan kelembagaan, aspek teknis, aspek ekonomi dan komersial, aspek lingkungan dan sosial, dan cara pengusahaan, pengelolaan risiko, kebutuhan fasilitasi kebutuhan daerah dan pemerintah daerah serta tindak lanjut permasalahan investasi.</li><li>Mewujudkan kemandirian, meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dalam mendukung peta jalan pengembangan industri bahan baku obat.</li></ul> | IPB University        | <p>Penyusunan IPRO melibatkan tenaga ahli jasa konsultan, dengan tahapan penyusunan di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi: Lampung</p> |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN</b>    |   |  |                       |   |
| 3   | <ul style="list-style-type: none"><li>Investment Project Ready to Offer (IPRO)</li><li>Proyek Pariwisata pada</li></ul> | Memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang investasi proyek pariwisata yang siap ditawarkan guna membantu calon   | PT Sinergi Visi Utama | Penyusunan IPRO melibatkan tenaga ahli jasa konsultan, dengan tahapan penyusunan di antaranya meliputi desk study   |



| NO | JUDUL DOKUMEN IPRO  | TUJUAN  | PENYUSUN              | KETERANGAN (Metode/Lokasi)   |
|----|---|---|-----------------------|--|
|    | Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru   | <p>investor dalam mengambil keputusan berinvestasi khususnya di DPP Bromo-Tengger-Semeru</p> <p>Menganalisis kelayakan investasi proyek pariwisata yang akan didorong dan dikembangkan oleh pemerintah dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah;</p> <p>Mengidentifikasi dukungan/manfaat pariwisata terhadap pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2030;</p> <p>Merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi program dan kebijakan, serta insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan pariwisata di Indonesia khususnya di DPP Bromo-Tengger-Semeru.</p> |                       | <p>pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi: Desa Ngadiwono, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</p> |
| 4  | Investment Project Ready to Offer (IPRO) Proyek Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Lombok-Gili Tramena | <ul style="list-style-type: none"><li>Memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang investasi proyek pariwisata yang siap ditawarkan guna membantu calon investor dalam mengambil keputusan berinvestasi</li></ul>  | PT Sinergi Visi Utama | <ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan IPRO melibatkan tenaga ahli jasa konsultan, dengan tahapan penyusunan di antaranya meliputi desk studypengumpulan data, Focus Group Discussion</li></ul>  |

| NO | JUDUL DOKUMEN IPRO | TUJUAN  | PENYUSUN | KETERANGAN (Metode/Lokasi)  |
|----|--------------------|---|----------|---|
|    |                    | <p>khususnya di DPN Lombok- Gili Tramena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis kelayakan investasi proyek pariwisata yang akan didorong dan dikembangkan oleh pemerintah dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah;</li> <li>• Mengidentifikasi dukungan/manfaat pariwisata terhadap pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2030;</li> <li>• Merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi program dan kebijakan, serta insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan pariwisata di Indonesia khususnya di DPN Lombok- Gili Tramena</li> </ul> |          | <p>(FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi: Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat</p> |

| NO  | JUDUL DOKUMEN IPRO   | TUJUAN   | PENYUSUN                      | KETERANGAN (Metode/Lokasi)   |
|---|--|--|-------------------------------|--|
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR</b> |  |  |                               |  |
| 5   | Investment Project Ready to Offer : "Kertajati Aircraft Maintenance Center - Maintenance | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan profil proyek Fasilitas MRO yang memuat informasi essensial yang dibutuhkan investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi;</li> <li>Mengidentifikasi potensi, permasalahan, kendala dan kebutuhan ruang terhadap penyediaan Fasilitas MRO di Bandara Kertajati;</li> <li>Merumuskan usulan strategi, rekomendasi, dan kebijakan kepada K/L terkait dan pemerintah daerah mengenai pengembangan infrastruktur Fasilitas MRO.</li> </ul> | PT Dewari Citraloka Indonesia | <p>Penyusunan IPRO melibatkan tenaga ahli jasa konsultan, dengan tahapan penyusunan di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Lokasi: Jawa Barat</p> |

**Tabel 26:** Daftar Perusahaan yang Difasilitasi oleh Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Data Dukung Indikator Kinerja Kelima)

| NO   | NAMA PROYEK                             | PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT   |
|--|---|--|---|
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM</b> |   |  |   |
| 1  | PT APEM Ltd.                            | PT APEM Ltd. berminat untuk menjadi pelaksana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Provinsi Banten dengan kapasitas 50 MW yang merupakan salah satu proyek Peta Peluang Investasi (PPI).   | Kementerian Investasi/BKPM melakukan fasilitasi PT APEM Ltd. dengan PT PLN. Dalam rencana pengembangan pembangkit PLTS yang akan ditenderkan oleh PT PLN, proyek PLTS Banten akan dipaketkan dalam proyek Jawa - Bali kuota tersebut, dengan total kapasitas sebesar 200MW untuk memenuhi <i>economic of scale</i> dari para penyedia IPP.  |
| 2  | International Labour Organization (ILO) | ILO sedang merencanakan pelaksanaan National Industry Dialogue for Responsible and Sustainable Electronics Supply Chains in Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, tim ILO menyampaikan proyek yang sedang dikerjakan yaitu Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chains (RISSC) and the Skills Development and Responsible Business Conduct for Transition, yang memiliki focus pada tata kelola ketenagakerjaan yang layak ( <i>decent work</i> ) untuk para pekerja di Indonesia. | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam upaya mendorong tata kelola yang berkelanjutan melalui peluncuran Panduan Investasi Lestari. Indikator dari Panduan Investasi Lestari telah mengatur beberapa aspek diantaranya dalam pilar sosial yaitu: keterwakilan gender dalam organisasi, keterwakilan kelompok rentan dan remunerasi karyawan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perlindungan anak yang juga sejalan dengan konsep <i>decent work</i> . |
| 3  | Arta Capital Partner Ltd. UK            | Arta Capital Partner Ltd. UK berminat pada proyek Peta Peluang Investasi Budidaya Udang Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mekanisme yang akan dilakukan adalah <i>direct investment</i> atau pendanaan langsung. Arta Capital Partner Ltd. UK ingin dapat berinvestasi langsung dengan mitra yang berada di sekitar lokasi proyek tersebut.  | Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Arta Capital Partner Ltd. UK, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa Barat dan PT BHJ.  |



| NO  | NAMA PROYEK   | PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT   |
|---|---|--|---|
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR</b> |   |  |   |
| 4   | Widgetworks Pte. Ltd  | Dalam perkembangan project pengembangan Industri <i>Wing in Ground</i> , PT. Bintan Inti Industrial Estate selaku pengelola Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) saat ini masih menunggu kepastian dari <i>business flow</i> yang diinginkan calon investor. | PT BIE memerlukan dukungan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait keberlangsungan project pengembangan Industri WIG dan insentif yang dapat ditawarkan kepada investor sebagai industri pioneer di Bintan.  |
| 5   | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd. (NFC Group) | NFC membutuhkan informasi lebih detail terkait dokumen pra-FS PPI proyek industri hilirisasi alumina dan bauksit di Indonesia.   | NFC Group akan mempelajari secara mendetail kedua proyek tersebut. NFC Group juga menyampaikan apabila mereka akan berinvestasi nantinya mereka akan menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) yang telah mendapatkan hak paten dan terbukti aman dijalankan pada perusahaan di RRT. Apabila NFC Group berminat untuk meninjau lokasi pada kedua proyek tersebut, maka akan dilakukan pendampingan dalam pertemuan dengan pengelola Kawasan Industri. |
| 6   | NewCo Automotive  | Dibutuhkan pemetaan <i>supply-chain</i> penyedia ekosistem industri mobil listrik dan mencari mitra lokal yang dapat dijajaki oleh Newco Automotive sebagai rekan kerjasama.   | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melakukan pendampingan terhadap Newco dalam menyiapkan <i>feasibility study</i> , terutama untuk memetakan <i>supply-chain</i> dalam ekosistem industri mobil listrik di Indonesia, serta memberikan rekomendasi mitra lokal yang dapat dijajaki oleh Newco Automotive sebagai rekan kerjasama.  |
| 7   | Tripatra Group  | Tripata Group membutuhkan informasi terkait insentif dan perizinan berusaha terkait rencana proyek penanaman modal.  | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan informasi terkait fasilitas pembangunan pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus, serta fasilitas <i>tax holiday/tax allowance</i> . Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memberikan penjelasan terkait perizinan berusaha di sektor pemulihran  |



| NO   | NAMA PROYEK                                 | PERMASALAHAN  | TINDAK LANJUT   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | material barang bukan logam (KBLI 38302) dan industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (KBLI 2015). Kementerian Investasi/BKPM mengharapkan Tripatra Group dalam waktu dekat dapat memutuskan lokasi kegiatan usaha dan KBLI yang akan dijalankan.   |
| 8  | KNDS France                                 | Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 yang mengatur batas kepemilikan saham asing sebesar 49% dan dapat lebih besar atas rekomendasi Kementerian Pertahanan.   | KNDS berkonsultasi terkait prosedur dalam menyiapkan Badan Hukum untuk kegiatan produksi industri senjata dan amunisi yang saat ini bekerja sama dengan PT. Pindad (Persero) sebagai partner dalam negeri.  |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN</b>                                     |   |   |   |
| <b>(Fasilitasi penyelesaian masalah strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK))</b> |   |   |   |
| 9  | KEK Merauke                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana pengembangan KEK Kehutanan, pangan dan energi di Merauke, Papua</li><li>b. Pengembangan meliputi 3 (tiga) fase yakni :<ul style="list-style-type: none"><li>- Fase 1 :piloting (~60.000 ha Padi &amp; Tebu, dan 500 ha Kawasan Industri),</li><li>- Pengembangan KEK (~152.000 - 667.000 ha)</li><li>- Fase 3, Perluasan dan pengembangan KEK (~2 jt ha)</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Percepatan proses pelepasan Kawasan Hutan (SLA 138 hr) (Kementerian LHK)</li><li>2. Penetapan titik/lokus dan gambar areal kawasan hutan yg akan dimanfaatkan dan diajukan menjadi KEK</li><li>3. Penyusunan dokumen masterplan dan KLHS.</li><li>4. Penyiapan BU pemrakarsa/pengusul KEK, perlu disiapkan Pepres penugasan (Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN).</li><li>5. Dukungan perizinan berusaha untuk fokus area 1 piloting dan promosi (Kemeninves/BKPM)</li></ul> |
| 10   | PT. GBKEK Industry Park (KEK Batang) Galang | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto dan Kampung Masiran, Kabupaten Bintan merupakan bagian dari rencana perluasan KEK</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengadakan audiensi dengan PT. GBKEK Industri Park pada tanggal 25 Januari 2024 dalam rangka fasilitasi</li></ul>  |



| NO | NAMA PROYEK | PERMASALAHAN  | TINDAK LANJUT   |
|----|-------------|---|---|
|    |             | <p>Galang Batang yang berlokasi Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau</p> <p>b. Pengusulan Proyek Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto dan Kampung Masiran, Kabupaten Bintan sebagai proyek PSN untuk Tahun 2024 diperkirakan akan memberikan kontribusi investasi sebesar Rp. 120,5 Triliun dengan luasan lahan yang diusulkan sebesar 2.189,11 Ha</p> <p>c. Pendanaan proyek perluasan Kawasan KEK ini akan dibiayai oleh PT. GBKEK Industri Park (kepemilikan saham 30%) bekerjasama/konsorsium dengan PT. Xhang haibo (PMA) dan PT. Song Jiabo (PMA) serta pendanaan melalui funding yang berasal dari dalam maupun luar negeri.</p> <p>d. Pendanaan proyek perluasan Kawasan KEK ini akan dibiayai oleh PT. GBKEK Industri Park (kepemilikan saham 30%) bekerjasama/konsorsium dengan PT. Xhang haibo (PMA) dan PT. Song Jiabo (PMA) serta pendanaan melalui funding yang berasal dari dalam maupun luar negeri.</p> | <p>pengusulan proyek PT. GBKEK Industri Park sebagai PSN</p> <p>2. Proyek tersebut dianggap layak masuk dalam pengusulan PSN karena memiliki manfaat bagi upaya Pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi nasional maupun daerah, antara lain mendukung hilirisasi Alumunium dalam meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebesar 110.000 orang</p> |

(Fasilitasi rencana proyek penanaman modal bidang jasa dan kawasan)



| NO   | NAMA PROYEK  | PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT  |
|--|--|--|--|
| 11   | Wanxinda Enterprise Group  | <p>Wanxinda Enterprise Group merupakan perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang manufaktur produk periferal TI, pengembangan real estat, ecommerce, dan bidang lainnya</p> <p>Memiliki ketertarikan dalam pengembangan kawasan industri dengan sistem klaster atau ekosistem industri dalam satu area dan telah melakukan penjajakan dengan KITB di Jawa Tengah dan Kawasan Rebana di Jawa Barat</p> | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan pendalaman atas minat investasi Wanxinda di bidang pembangunan kawasan industri sehingga dapat dilakukan fasilitasi yang teprencana investasinya dengan tepat  |
| 12   | Green Environment and Technology Precast Concrete Co.,Ltd (GET PC) | <p>Green Environment and Technology Precast Concrete Co.,Ltd (GET PC)</p> <p>Perusahaan asal Korea yang bergerak dalam bidang produksi material konstruksi precast concrete melakukan penjajakan lokasi beberapa kawasan industri untuk dijadikan lokasimenjalankan kegiatan usahanya</p>  | <p>Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan pendalaman atas minat investasi Green Environment and Technology Precast Concrete Co.,Ltd (GET PC)</p> <p>dan memberikan informasi terkait kebutuhan primer pelaku industri kawasan dan kebutuhan primer industri</p> |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR</b>                      |  |  |  |
| <b>(Fasilitasi Proyek Penanaman Modal Bidang Infrastruktur )</b> |  |  |  |
| 13   | Proyek Bendungan Meninting, Lombok Barat                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permasalahan pendekatan kekeluargaan dan sosialisasi mengingat banyak masyarakat sekitar pembangunan bendungan yang terdampak terhadap kualitas air yang mereka pakai sehari-hari.</li><li>• Kurangnya ketersediaan material terkait konstruksi pembangunan.</li><li>• Keterbatasan ruang kerja dan kondisi medan curam pada</li></ul>                               | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dan BWS Nusa Tenggara 1 untuk diberikan informasi terkait menemukan solusi atas permasalahan tersebut.        |



| NO | NAMA PROYEK  | PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT  |
|----|--|--|--|
|    |  | lokasi pekerjaan membatasi jumlah alat yang harus disediakan.  |  |
| 14 | Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Lombok Timur | <ul style="list-style-type: none"><li>Dalam proses pengembangan Sidrap 2 dibutuhkan daya 70 MW, Sukabumi 150 MW, dan Lombok 100 MW. Barito Renewable telah melakukan penyusunan <i>feasibility study</i> dan telah diperoleh estimasi potensi listrik sebesar 100 MW.</li><li>Barito Renewable telah melakukan proses pemasangan <i>matt mass</i> untuk mengetahui data energi angin di Lombok dan Sukabumi.</li></ul> | Barito Renewable dengan PT PLN telah melakukan diskusi terkait penambahan <i>demand</i> , diiharapkan kedepannya Barito Renewable dapat berdiskusi lebih lanjut terkait <i>demand</i> ketenagalistrikan bersama Kementerian Investasi/BKPM khususnya di wilayah Pulau Lombok |

**(Fasilitasi Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 15 | Proyek KPBU Revitalisasi dan Pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) Kota Denpasar | <ul style="list-style-type: none"><li>Optimalisasi manfaat dari proyek ini proyek ini antara lain mendukung meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan keamanan masyarakat dan lalu lintas, memberikan dukungan terhadap aspek sosial dan sektor pariwisata.</li><li>Tersedia data APJ yang lengkap dan valid, dengan teknologi terkini dan ramah lingkungan, sehingga terjadi penghematan pembayaran tagihan listrik APJ, dan tersedianya APJ dengan kuantitas dan kualitas yang optimal.</li></ul> | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan fasilitasi kegiatan <i>market sounding</i> melalui penyebaran informasi <i>market sounding</i> kepada investor potensial dan lembaga pembiayaan serta menjadi juru penerang bidang penanaman modal pada sesi <i>one-on-one meeting</i> |
| 16 | Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Terbatasnya biaya yang dimiliki berupa biaya fasilitasi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Kementerian PUPR yang</li></ul>   | Kementerian Investasi/BKPM berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses perizinan yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek.   |

| NO | NAMA PROYEK     | PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT   |
|----|-----------------|--|---|
|    | Regional Lombok | <p>saat ini berada di tahap penyusunan dokumen pra studi kelayakan proyek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan perizinan dalam ruang lingkup perizinan teknis</li> <li>• </li> </ul> | Mengingat proyek SPAM melibatkan banyak pihak, Kementerian Investasi bertindak sebagai koordinator antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua pihak bekerja secara sinergis dan proyek berjalan lancar. |

Tabel 27: Rincian Peta Peluang Investasi (Data Dukung Indikator Kinerja Keenam)

| NO.   | PROYEK                              | LOKUS                                   |
|---|-------------------------------------|---|
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN</b>    |                                     |   |
| 1   | Smart Eco Industrial Park           | Kabupaten Lamongan, Jawa Timur          |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM</b>    |                                     |   |
| 2   | Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan | Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur |
| <b>DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR</b> |                                     |   |
| 3   | Industri Katoda Baterai EV          | Kabupaten Batang, Jawa Tengah           |